

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wiratama & Sulastriono., "Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)." *Jurnal Hukum*, vol. III No II Desember 2020 hlm 1093-1104.
- Adistia, M. (2024). *Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli*. *UNES Review*, 6(3), 18-21. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Aditama, Purna NA. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli." *Jurnal Hukum*, vol. XX, no. XX, 2022.
- Amalia Sholikhah & Sulastriono., "Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan." *Jurnal HUKI TORAA*, vol. VIII Issue III, 2022.
- Amir Arivan., "Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* vol VIII no I Mei 2019 hlm 51-65.
- Ariawan, I. G. K., & Widya, K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya Jurnal Hukum, 1(1).
- Arijati, T., & Hanim, L. (n.d.). *Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah dan Bangunan*.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Benni, B., Kurniawarman, & Rahman, A. (2021). *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan di Kota Bukittinggi*. Ikatan Notaris Indonesia.
- Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji, R. (2024). *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570-574. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Darusman, Y. M. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*.
- Dewi Rasda et al., "Responsibilities of Land Deeds Making Officials in Land Registration." *Journal STIH AMSIR*, 2021.
- Effendi Perangin H., *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Harsono Boedi., "Hukum Agraria Indonesia." Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).
- Kanna, M. R. (2022). *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Hak Bersama Para Ahli Waris yang Berkaitan dengan Hak Atas Tanah*. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.
- Kode Etik PPAT, Pasal 6 Ayat (1).

- Korompis, Syendy A. *"Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."* Lex Privatum, vol. VI, no. 1, Januari-Maret 2018.
- Lamia, C. F. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*. Lex Privatum, II (3).
- Limbong Benhard., *"Konflik Pertanahan."* Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012.
- Mayra, H., & Simatupang, D. P. N. (2021). *Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?* Jurnal Hukum, 10(1). <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>
- Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum*. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 106-118.
- Natsir, Achmadi. *"Administrasi dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah."* Jurnal Ilmiah, 2022.
- Parlindungan, AP. *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Pasal 45 PerkaBPN No. 1 Tahun 2006 tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional.
- Pasal 55 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pramarta, B., Safa'at, R., & Djatmika, P. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dan Para Pihak yang Memalsukan Surat Keterangan Objek Pewaris*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017
- Salim HS., *"Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah."* Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim, HS. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Santoso Urip., *"Pendaftaran dan Peralihan Hak-hak Atas Tanah."* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Soesangobeng Herman., *"Hukum Pertanahan: Kumpulan Peraturan yang Mengatur Hubungan Hukum atas Tanah."* Jakarta: [Penerbit Tidak Diketahui], 2012.
- Soesangobeng, Herman. *Hukum Pertanahan: Kumpulan Peraturan yang Mengatur Hubungan Hukum atas Tanah*. Jakarta: [Penerbit Tidak Diketahui], 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
- Wicaksono Nizar Satrio., *"Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris yang Diregister oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat yang Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)." Indonesian Notary vol II no I Maret*

2020.

Wiratama, Adi & Sulastriyono. *"Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan."* Jurnal HUKI TORAA, vol. XX, no. XX, 2022.

Yazid, R. B. (2021). *Proses Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.